

**Temuan BPK Tanda Buruknya Perencanaan Upacara HUT RI
di IKN dan Jakarta,
DPR Sebut Tidak Pengaruhi Sidang Tahunan**



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 13/06/2024

Selain kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, pelabuhan bongkar muat yang belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan bagaimana rancangan serah terima aset, serta mekanisme pemeliharaan infrastruktur IKN tahap I dalam sorotan BPK.

BALIKPAPAN – Sejumlah temuan yang didapat Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), menambah daftar lelang mega proyek itu usai mundur serentaknya dua pimpinan Otorita IKN pekan lalu.

Untuk diketahui, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK Semester II 2023, ditemukan jika pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi pembangunan infrastruktur IKN Tahap I belum optimal.

Di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi, harga pasar material batu split dan sewa kapal. Tongkang tidak sepenuhnya terkendali, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh, dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

Temuan BPK lainnya, Kementerian PUPR belum sepenuhnya memiliki rancangan serah terima aset, rencana alokasi anggaran operasional, serta mekanisme pemeliharaan dan pengelolaan aset dari hasil pembangunan infrastruktur IKN Tahap I. Kemudian, persiapan pembangunan infrastruktur belum memadai yang disebabkan persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala.

Di mana 2.085,62 hektare (ha) dari 36.150 ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain. Serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah. Menanggapi hasil temuan BPK itu, anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin menuturkan jika adanya persoalan perencanaan tak bisa dipungkiri dalam pembangunan IKN. Antara lain belum terlaksananya sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Seperti KPBU dan swasta murni/BUMN/BUMD.

“Sampai hari ini, total APBN yang digelontorkan untuk pembangunan IKN hingga tahun 2024 sudah akan menembus Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran IKN sekitar Rp466 triliun, sedangkan pendanaan melalui KPBU maupun investasi swasta murni terbilang masih rendah,” jelasnya dalam keterangan resminya. Lanjut dia, sejak 2023 hingga Januari 2024, investasi yang masuk ke IKN baru Rp47,5 triliun. Dari sektor swasta Rp35,9 triliun dan sisanya dari sektor publik Rp11,6 triliun.

Sementara targetnya adalah Rp100 triliun hingga akhir tahun ini. “Fraksi PKS menilai, pengusaha belum tertarik pada IKN, karena karakteristik investasi IKN adalah investasi infrastruktur publik, tapi publiknya belum ada,” ungkap legislator Dapil Jawa Tengah IV itu. Apalagi, sebut dia, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 2014-2015 Andrinof Chaniago baru-baru ini justru mengatakan tidak ada bukti konkret investor menanamkan investasinya di IKN.

Yang ada, mereka yang pernah menyatakan tertarik malah menambah investasi di tempat lain. “Hal lainnya, investor khususnya dari negara maju punya standardisasi, tidak menghendaki pembangunan yang ada deforestasi (penebangan hutan) dan dampak sosial yang negatif kepada masyarakat lokal. Namun, kenyataannya terlihat dari temuan BPK,” ungkapnya.

Persiapan pembangunan infrastruktur IKN, ujar Hamid, disebut BPK belum memadai karena masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan.

Bahkan, sebanyak 2.085,62 ha dari 36.150 ha tanah atau 5,8 persennya, masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan. Serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah. Terkait hal itu, Hamid menilai hal itu terjadi karena pemerintah tidak pernah melibatkan komunitas adat yang terdampak sejak awal pembangunan IKN. Dirinya pun mendesak pemerintah untuk tidak menggusur paksa masyarakat dan harus melindungi wilayah adat yang dikuasai turun temurun di kawasan IKN.

“Temuan BPK lainnya, pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN Tahap I dianggap belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi dan pelabuhan bongkar muat yang belum dipersiapkan secara menyeluruh,” ungkapnya. Hal ini, terjadi karena dermaga logistik IKN baru tuntas dibangun Kementerian PUPR pada April 2024 lalu.

“Diharapkan, dermaga logistik tersebut dapat mempercepat pembangunan jalan tol akses IKN, bandara, serta proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN,” jelasnya. Selain temuan BPK, mundurnya dua pimpinan Otorita IKN, nihilnya investasi asing, hingga keputusan pemerintah yang kemudian membagi pelaksanaan Agustusan di IKN dan Jakarta dari sebelumnya dipusatkan di Nusantara, menuai sorotan publik yang menilai proyek IKN terlalu dipaksakan.

Saat ditemui di Alun Alun Taruna Desa Bukit Raya, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) kemarin, Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otoritas IKN Raja Juli Antoni menerangkan, bersama Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg), pihaknya siap melaksanakan peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di IKN. Politikus PSI itu berdalih ada alasan mengapa pelaksanaan upacara dibagi dua lokasi.

“Upacara ini diselenggarakan di dua tempat. Di Jakarta tetap, ya. Karena jangan sampai orang melupakan Jakarta. Sebagai kota yang historis. Tapi kita mengatakan selamat datang, dengan kemudian nanti kita selenggarakan juga di ibu kota negara (IKN),” katanya kepada Kaltim Post. Menurutnya, pemerintah ingin mengingatkan kepada masyarakat agar jangan melupakan Jakarta sebagai mantan ibu kota negara.

Pria yang juga menjabat Wakil Menteri (Wamen) Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) ini menyebut, pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI akan diselenggarakan dengan cara yang sederhana, dan penuh khidmat di IKN. “Tapi tentu, *insyaallah* juga penuh dengan kesyukuran kita mempunyai ibu kota baru. Tetapi juga Jakarta tetap menjadi kota yang terlengkap bagi rakyat,” ujar Raja Juli Antoni.

Ditanya teknis peringatan HUT Kemerdekaan RI di IKN yang tinggal dua bulan lagi ini, Raja Juli enggan membeberkannya. Termasuk juga tamu undangan yang hadir. Kata dia, teknis pelaksanaan masih terus dirumuskan Kemensetneg. “Teknisnya nanti akan diumumkan Kemensetneg. Jadi hari ini saya kira ada kunjungan dari sekretaris militer dan beberapa instansi kementerian kondisi (di lapangan). Tapi terakhir, kami lihat bersama Pak Jokowi, minggu lalu, *insyaallah* sekali lagi Otorita IKN akan bekerja sama sekuat tenaga untuk memastikan. Bahwa acara 17 Agustus nanti berjalan keren, khidmat sekaligus tadi upacara transisi ya mengucapkan selamat datang IKN. Dan jangan lupakan di Jakarta nanti,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan, bahwa adanya skenario pemerintah untuk menyelenggarakan upacara di IKN tidak memengaruhi penyelenggaraan sidang bersama 16 Agustus nanti. Dia mengaku DPR RI bersama MPR RI dan DPD RI telah mempersiapkan beragam skenario terkait jika ada perubahan keputusan politik, baik itu dari presiden maupun DPR RI.

“Tidak (ada pengaruh). Jadi gambaran besarnya adalah bahwa kalau nanti dimungkinkan untuk acara (upacara) 17-an (di IKN), itu juga sangat terbatas gitu ya. Jadi yang lain selebihnya tetap fokus di Jakarta. Jadi buat kami sebenarnya persiapan (sidang) ini tidak terlalu memberatkan. Saya kira ini tantangan kita tapi semua aspek sudah kami analisa dan kami sudah antisipasi semuanya,” ujar Indra. **(riz2)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Temuan BPK Tanda Buruknya Perencanaan Upacara HUT RI di IKN dan Jakarta, DPR Sebut Tidak Pengaruhi Sidang Tahunan, 13/06/24

Catatan:

Dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara diatur sebagai berikut:

- (1) Rencana Induk Ibu Kota Nusantara merupakan dokumen perencanaan terpadu yang menjadi pedoman bagi otorita Ibu Kota Nusantara dan/atau pemerintah pusat dalam melaksanakan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara dalam rencana induk Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.